

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Upaya pemerintah buat melaksanakan pemerataan dan berbagai pencapaian suatu tujuan pengelolaan keuangan ialah diberikan kebijakan kepada pemerintah daerah buat melaksanakan urusan pemerintah secara efektif agar tercapainya pemerataan di berbagai daerah, sehingga seluruh pelaksanaan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk menjalankan otonomi daerah dengan landasan prinsip akuntabilitas, Wicaksono, (2015). Pemerintah daerah mengelola dan melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel sebagai mana diatur didalam Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dimana disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerinah yang mana mewajibkan setiap pemerintah pusat ataupun daerah menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh pihak BPK yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah.

Salah satu langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah dengan cara penyusunan dan pemerikaaan laporan keuangan pemerintah tersebut. BPK RI yang merupakan auditor pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat tiga kategori yang disajikan yaitu 1. Opini 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Undang Undang. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara terdapat 4 jenis opini audit yang diberikan pada hasil pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinio), Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi namun juga eksternal organisasi. Pihak internal organisasi yang paling kompeten dalam alur pelaksanaan akuntabilitas adalah kementerian atau lembaga terkait sedangkan pihak eksternal organisasi dapat merujuk pada lembaga resmi yang bersifat independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua aspek kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Ketiga aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan terakhir aspek efektifitas sistem pengendalian intern. Salah satu indikator laporan keuangan dikatakan transparan adalah opini BPK atas laporan keuangan. Jika opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan laporan keuangan sudah transparan. opini WTP secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh kementerian/lembaga dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan masih terdapat beberapa wilayah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dapat dilihat dari opini hasil audit BPK sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
(Tahun 2018-2022)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Empat Lawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kabupaten Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kabupaten Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Kabupaten Musi Rawas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kabupaten Musi Rawas Utara	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
Kabupaten Ogan Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kabupaten Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
Kabupaten Ogan Komering Ulu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	WTP	WTP	WDP	WTP PSH	WTP PSH
Kota Lubuk linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Pagar Alam	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH

Berdasarkan tabel 1.1 diatas berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 dari 17 kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan terdapat 4 kabupaten/kota yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini ini turun dari tahun sebelumnya yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keempatnya adalah kota Palembang, kota pagar alam, kabupaten ogan ilir, dan kabupaten musi banyuasin dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah yaitu desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah.

Faktor Pertama yaitu Desentralisasi fiskal menambah pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ini dipengaruhi desentralisasi fiskal perihal memberi kesempatan ke daerah buat membangun kemandirian agar bisa mendapatkan pendapatan. Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, mewujudkan kemandiriannya atas keuangan (fiskal) daerah telah terdesentralisasi, perihal Pemda menggunakan kekuasaan sebagai mengelola keuangan sebagai kepentingan masyarakat daerah (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan Daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella et al., 2014).

Desentralisasi fiskal menyebabkan terjadinya aliran dana yang besar ke daerah dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri, selain mengelola keuangannya sendiri pemerintah daerah juga harus membuat pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diukur menggunakan kemandirian daerah. Desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada didaerah.

Faktor kedua yaitu Kinerja pemerintah daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, kinerja pemerintah daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam hal pelayanan publik, pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan yang baik, maupun pembangunan ekonomi dan sosial. Kinerja pemerintah daerah biasanya diukur melalui berbagai indikator, termasuk pencapaian target-program, efisiensi penggunaan anggaran, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan. Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah didukung oleh kinerja pemerintah yang dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, Saragih & Siregar, (2020).

Kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan surplus/defisit maupun aktiva dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Kinerja pemerintah daerah melakukan berbagai perbaikan pembangunan ataupun kebutuhan lainnya, juga peningkatan atau penurunan pendapatan dari berbagai daerah. Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah di dukung oleh kinerja pemerintah dijalankan secara tertib serta bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan. Hal ini pada laporan keuangan pemerintah mempunyai akuntabilitas sangat baik (Oktaviani et al., 2020). Hasil Penelitian *Meliyana Fitri, Husnul Khotimah* (2022) Menunjukkan Bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan berbagai permasalahan yang terkait di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Desentralisasi Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini memiliki batasan pembahasan, agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen yang terdiri dari Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah sedangkan variabel dependen dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal secara parsial terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kinerja Pemerintah secara parsial terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah secara simultan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang Desentralisasi fiskal, Kinerja pemerintah daerah dan Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan tentang akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai acuan dan pedoman untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam akuntabilitas pelaporan keuangan.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang bisa dijadikan untuk bahan referensi dan evaluasi untuk memperbaiki akuntabilitas pelaporan keuangan.